# PENELITIAN PENGEMBANGAN

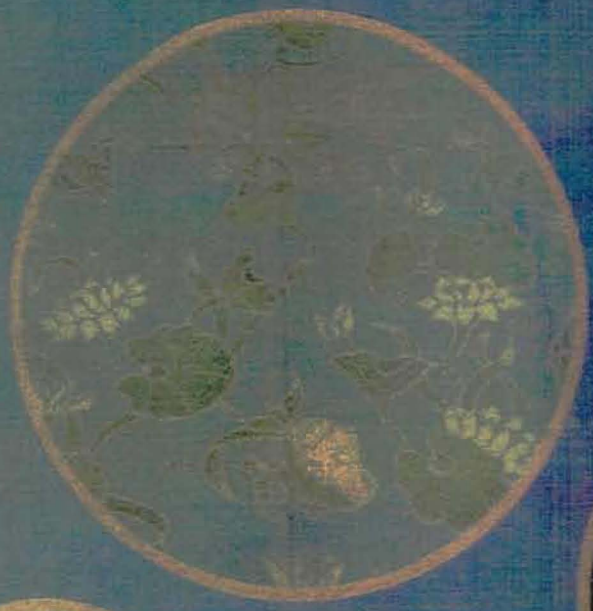
## KOMODITAS/PRODUK/JENIS USAHA UNGGULAN UMKM

# KOTA PROBOLINGGO

# 2013



















Kerja sama
Universitas Negeri Malang dengan Bank Indonesia

# PENELITIAN PENGEMBANGAN KOMODITAS/PRODUK/JENIS USAHA UNGGULAN UMKM KOTA PROBOLINGGO

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**KERJASAMA**

BANK INDONESIA

**DAN**

**TIM PENELITI**
**FAKULTAS EKONOMI**
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**MALANG**
**2013**

# RINGKASAN
# PENELITIAN PENGEMBANGAN KPJU UMKM KOTA PROBOLINGGO
# 2013

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis, tercermin dari berbagai data yang mendukung eksistensi UMKM dalam perekonomian Indonesia cukup dominan menghadapi krisis. Data Kementrian Negara Koperasi& UKM tahun 2011 menyebutkan bahwa jumlah industri UMKM terdapat dalam setiap sector ekonomi dan tercatat sebanyak 51,3 juta unit atau setara 99,91% dari total usaha. UMKM berpotensi besar menyerap tenaga kerja sebesar 97,04% dari total angkatan kerja yang bekerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB sebesar 55,56 % dari total PDB.

Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM melakukan penelitian tentang UMKM yang dapat dipergunakan sebagai informasi untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperoleh KPJU Unggulan maupun potensial untuk kepentingan*stakeholders*, baik pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas dalam upaya pemberdayaan UMKM.

Penelitian KPJU dimaksudkan untuk mengenal dan memahami profil daerah, profil UMKM, kebijakan Pemerintah dan peranan Perbankan dalam pengembangan UMKM, memberikan informasi tentang KPJU unggulan, memberikan informasi permasalahan yang timbul dari masing-masing KPJU unggulan, KPJU potensial, memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pihak perbankan dalam rangka pengembangan KPJU unggulan.

Penelitian KPJU dilaksanakan di 5 kecamatan di Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil penelitian KPJU ditemukan lima KPJU Unggulan, lima KPJU potensial dan permasalahan yang dihadapi oleh KPJU Unggulan sebagai berikut:

| KOMODITAS UNGGULAN |
|---|
| **KOTA PROBOLINGGO** |
| Batik |
| Bordir |
| Rumah Makan |
| Mangga |
| Hotel |

**PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KOTA PROBOLINGGO**

| PRODUK | BATIK | BORDIR | RUMAH MAKAN | MANGGA | HOTEL |
|---|---|---|---|---|---|
| **MASALAH YANG DIHADAPI** | • Minimnya Sarana Dan Prasarana<br>• Kurangnya Tenaga Kerja | • Berkurangnya Minat Para Pengrajin Yang Sudah Terampil | Kurangnya pola konsumtif dari warga Probolinggo | Anjlioknya harga ketika musim panen tiba | • Persaingan antar hotel<br>• Biaya peremajaan hotel |

| KOMODITAS POTENSIAL |
|---|
| **KOTA PROBOLINGGO** |
| Krupuk Jenggelek |
| Lele |
| Jasa Angkut Barang |
| Anggur |
| Travel |

## Rekomendasi Kebijakan

| KOTA PROBOLINGGO |
|---|
| • Pelatihan Proses Membatik<br>• Kemudahan Dalam Peminjaman Modal Dengan Bunga Rendah Untuk UMKM<br>• Penyediaan Tenaga Yang Sudah Terampil Dan Telah Dilatih<br>• Pengadaan modal dengan bunga ringan<br>• Pelatihan cara mengemas<br>• Pelatihan cara mengelola uang/ biaya<br>• Pelatihan pengolahan mangga menjadi keripik dan sirup dan olahan lainnya<br>• Bantuan mesin pengering untuk keripik<br>• Pembuatan paguyuban pengusaha<br>• Pengembangan SDM<br>• Pengadaan budidaya bibit dibalai benih<br>• Pengkoordinasian paguyuban<br>• Pengkoordinasian antar pemilik travel |
| **PERAN PERBANKAN**<br>• Dalam mendorong pertumbuhan UMKM, bank menyalurkan kredit UMKM antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Usaha Pembibitan Sapi, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Usaha Mikro, Kredit Modal Kerja<br>• Perbankan diharapkan dapat meningkatkan kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi produk perbankan bagi UMKM dan meningkatkan komunikasi dan sumber informasi |

**PERAN PEMERINTAH**

- Kebijakan pemerintah seharusnya lebih banyak dikoordinasikan antar sektor di kelima kota/kab agar dapat terjalin hubungan baik antar sektor
- Melakukan koordinasi guna memperoleh solusi permasalahan dalam upaya meningkatkan potensi dan prospek UMKM sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat

# DAFTAR ISI

Halaman


RINGKASAN ..... i

EXECUTIVE SUMMARY ..... iv

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI. ..... vii

DAFTAR GAMBAR ..... ix

DAFTAR TABEL ..... x

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Tujuan Penelitian ..... 3
1.3 Ruang Lingkup Penelitian ..... 4
1.4 Hasil yang Diharapkan ..... 4

BAB II METODOLOGI ..... 6

2.1 Daerah Penelitian ..... 6
2.2 Jenis dan Sumber Data ..... 6
2.3 Teknik Pengumpulan Data ..... 6
2.4 Analisis Data ..... 7
2.5 Penentuan KPJU Tingkat Kecamatan ..... 8
2.6 Penentuan KPJU Tingkat Kabupaten/Kota ..... 8

BAB III TINJAUAN WILAYAH ..... 10

BAB IV HASIL PENELITIAN ..... 11

4.1 Penetapan KPJU Unggulan Kecamatan ..... 11
4.2 Penetapan KPJU Unggulan Kota/Kabupaten ..... 11
4.3 Penetapan KPJU Unggulan dan Potensial Kota/Kab. ..... 12

BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN ..... 15

5.1 KPJU Unggulan di Kota Probolinggo..... 15
5.2 Peranan Perbankan Dalam Pengembangan UMKM.....19
5.3. Analisis SWOT Tiap Sektor Di Masing-masing Kota..... 19
5.4. Potensi dan Prospek KPJU Potensial Serta Kebijakan Untuk Mendukung KPJU Potensial .....21

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN.....25

6.1 Kesimpulan .....25
6.2 Rekomendasi Kebijakan .....26

DAFTAR PUSTAKA.....28

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis, tercermin dari berbagai data yang mendukung eksistensi UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi Indonesia. Data dari Kementrian Negara Koperasi & UKM tahun 2011 menyebutkan bahwa jumlah industri UMKM terdapat dalam setiap sektor ekonomi dan tercatat sebanyak 51,3 juta unit atau setara 99,91% dari total usaha. UMKM berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerjasebesar97,04% dari total angkatan kerja yang bekerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB sebesar 55,56 % dari total PDB.

Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia memiliki kebijakan dari sisi permintaan (*Demand Side*) dan penawaran (*Supply Side*). Kebijakan *Demand Side*merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan eligibilitas dan kapabilitasnya sehingga *bankable* yang meliputi penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan kerjasama dengan lembaga internasional dan Pemerintah. Kebijakan *Supply Side*merupakan kebijakan yang difokuskan pada berbagai kebijakan dan program untuk membantu bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM yang meliputi pengaturan kepada perbankan,penguatan kelembagaan dan penyediaan dana secara tidak langsung melalui penerbitan SUP No.005 dan dana *relending*. Kebijakan dari sisi permintaan berupa penelitian dimaksudkan dalam rangka pemberian informasi yang dapat digunakan dalam mendorong pertumbuhan UMKM, informasi kepada*stakeholders,* baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta,dan masyarakat luas.

Bank Indonesia sejak lama mengembangkan penelitian *Baseline Economic Survey* (BLS) yang bertujuan mengidentifikasi berbagai peluang investasi di daerah yang bermuara pada pemberian informasi potensi ekonomi suatu daerah. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2006,

penelitian BLS lebih diarahkan kepada penelitian pengembangan potensi ekonomi daerahyang memberikan informasi kepada *stakeholders* mengenai Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) potensial untuk menjadi unggulan daerah yang dapat dikembangkan terutama terhadap UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di daerah.

Data dan informasi dalam Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan UMKM meliputi aspek makro berupa kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan potensi ekonomi daerah dalam rangka pengembangan UMKM. Sementara pada aspek mikro, meliputi kondisi dan potensi UMKM. Hasil penelitian tersebut akan didiseminasikan dalam *website* Sistem Informasi Terpadu Pengembangan UKM (SI-PUK) yang terintegrasi dalam Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI), dan dapat diakses melalui internet di alamat **www.bi.go.id**.

Metode Penelitian Pengembangan KPJU UMKM Bank Indonesia menggunakanMetode *Analytic Hierarchy Process*(AHP) yang dimodifikasi. Dalam menetapkan KPJU unggulan kecamatan dan kabupaten/kotamenggunakan Metode Bayes dan Metode Borda. Dari hasil penelitian tersebut, tiap kabupaten/kota di suatu provinsi memiliki KPJU unggulan dari berbagai sektor ekonomi untuk dikembangkan yang dapat dilihat dari beberapa perspektif:

a. Perspektif *Product Life Cycle* (PLC)

   KPJU disebut unggulan dengan melihat tahap kematangan KPJU, dalam tahap *mature* karena saat ini unggul dibanding KPJU yang lain (meskipun kemungkinan besar akan mengalami *decline* setelah melewati fase *mature*), atau saat ini tidak terlalu unggul namun berpotensi besar unggul di masa depan (*fase growth*) yang dapat menimbulkan konsekuensi pada perspektif strategi pengembangan.

b. Perspektif Tujuan

   Dalam perspektif tujuan, penentuan KPJU unggulan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atau tujuan atau target yang ingin dicapai, dengan meyakinkan investoragar berinvestasi pada bisnis KPJU unggulan yang terpilih dengan jaminan *return* yang cepat, atau dengan

memberikan stimulus bagi usaha lemah namun berpotensi unggul di masa datang.

c. Perspektif Keberpihakan

Pemilihan KPJU unggulan dengan melibatkan unsur keberpihakan, pada pengusaha lokal.

d. Perspektif Skenario Kebijakan

KPJU disebut unggulan dengan melihat dari kondisi saat ini (*existing*) KPJU unggul dibanding dengan yang lain tanpa melihat ada kontradiksi dengan skenario kebijakan pemerintah normatif.

Berdasarkan keempat perspektif di atas, penelitian KPJU akan lebih fokus, sehingga Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan kebijakan ekonomi melalui pengembangan KPJU unggulan di suatu kabupaten/kota sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi angka/tingkat kemiskinan di daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

## 1.2. Tujuan Penelitian

a. Mengenal dan memahami mengenai:
   1) Profil daerah, meliputi: kondisi geografis, demografi, perekonomian dan potensi sumberdaya.
   2) Profil UMKM di wilayah penelitian termasuk faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan UMKM.
   3) Kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Daerah Tingkat I dan II) yang terkait dengan pengembangan UMKM.
   4) Peranan Perbankan dalam pengembangan UMKM.

b. Memberikan informasi tentang KPJU unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di suatu kabupaten/ kota dan kecamatan dalam rangka:
   1) Mendukung pembangunan ekonomi daerah;
   2) Menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja

3) Meningkatkan daya saing produk.

c. Memberikan informasi dan permasalahan yang timbul dari masing-masing KPJU unggulan lintas sektoral di masing-masing kabupaten/kota, misalnya mengenai bahan baku, tenaga kerja, teknologi yang digunakan, produksi, kondisi permintaan, harga dan lokasi (kecamatan).

d. Memberikan informasi tentang KPJU potensial, yaitu KPJU yang saat ini belum menjadi unggulan namun memiliki potensi untuk menjadi unggul di masa datang apabila mendapatkan perlakuan atau kebijakan tertentu.

e. Memberikan rekomendasi berupa:
   1) KPJU unggulan yang perlu/dapat dikembangkan di masing-masing kabupaten/kota
   2) Peranan Perbankan dalam pengembangan KPJU unggulan
   3) Kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dalam rangka pengembangan KPJU unggulan UMKM.

## 1.3. Ruang Lingkup Penelitian

a. UMKM dengan kategori sebagai unggulan daerah pada tingkat kabupaten/kota.

b. UMKM sebagaimana disebutkan dalam UU No.20 Tahun 2008
   1) Usaha Mikro
   2) Usaha Kecil
   3) Usaha Menengah

c. Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulanyang mendukung perekonomian daerah antara lain:
   1) mampu menciptakan dan menyerap tenaga kerja
   2) mempunyai prospek yang baik
   3) berdaya saing tinggi.

4) Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Potensial lintas sektoral yang tidak masuk lima besar di tingkat kabupaten/kota yang dapat menjadi KPJU

unggulan apabila ada perlakuan atau kebijakan tertentu denganpenjelasan kelemahannya agar dapat diformulasikan perlakuan tertentu atau kebijakan yang perlu diambil agar KPJU potensial tersebut dapat berkembang menjadi KPJU unggulan.

5) KPJU pada setiap sektor/subsektor ekonomi, yang meliputi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan), pertambangan dan penggalian, perindustrian, perdagangan dan jasa-jasa
6) KPJU sampai dengan nama KPJU akhir(misalnya: padi sawah, kacang hijau, angkutan perkotaan).

## 1.4. Hasil yang Diharapkan

a. Laporan Hasil Penelitian KPJU unggulan di Kota Probolinggo.
b. Terjalinnya kerjasama multipihak dalam mendorong peningkatan usaha yang termasuk dalam KPJU unggulan di Kota Probolinggo.
c. Menjadikan laporan KPJU unggulan Kota Probolinggo sebagai salah satu input dalam proses penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan serta program pembangunan di Kota Probolinggo.